



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT DANAREKSA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUHAMMAD TEGUH WIRAHADIKUSUMAH**
2. Jabatan : **DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RESIKO**
3. NHK : **792338**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 21.265.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 565 m2/396 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/87 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.265.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/800 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 1.859.000.000**

1. MOBIL, MAZDA MAZDA 6 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, MAZDA BIANTE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, LEXUS RX300 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.509.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 620.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. 2.515.399.772**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 4.022.261.808**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. 3.320.000.000**



Sub Total	Rp.	33.601.661.580
III. HUTANG	Rp.	1.427.818.196
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	32.173.843.384

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.